

9 Pejabat Wonosobo Dilantik



KR-Ariswanto

Bupati Wonosobo dan para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan.

WONOSOBO (KR) - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat melantik dan mengambil sumpah enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Senin (8/11) di Pendapa Kabupaten. Tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan hasil asesmen untuk mengisi kekosongan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga (Disdikpora), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan (Disperkimhub), Satpol PP.

Tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya merupakan proses rotasi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Staf Ahli Bupati, serta Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Selain melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II, Bupati juga melantik 37 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas atau Eselon III dan IV. Termasuk penyerahan SK kepada 10 pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.

Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Pihaknya minta agar para pejabat yang baru dilantik tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik, dedikasi, dan loyalitas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Apresiasi juga disampaikan Bupati kepada Badan Kepegawaian Daerah yang telah melaksanakan semua prosedur pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Menurutnya, pelantikan dan mutasi jabatan di instansi pemerintah ini adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai. "Penentuan jabatan yang dilakukan telah melalui berbagai pertimbangan baik kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas dan pendidikan pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya pengangkatan dalam jabatan ini, kami berharap dapat menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan tata kelola Pemkab Wonosobo," jelas Bupati. (Art)

JUGA DISERAHKAN 4 RAPERDA LAIN
RAPBD Purbalingga 2022 Rp 2,077 Triliun

PURBALINGGA (KR) - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Purbalingga Tahun 2022 mencapai Rp 2,077 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,40 persen dibanding APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp 2,028 triliun.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), mengungkapkan hal itu dalam sambutan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Empat Rancangan Peraturan Daerah Lainnya, Senin (8/11) di gedung DPRD setempat. Menurutnya, kenaikan

rencana anggaran 2022 lebih banyak berasal dari pendapatan yang bersifat *ear-marked*, yakni langkah efisiensi atau dana yang disisihkan seperti pendapatan dari Badan Layanan Umum Daeah (BLUD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun 2022 juga ada kenaikan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, dengan nominal cukup besar untuk membiayai gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK formasi tahun 2021.

"Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 mengalami penurunan 3,15 persen dibanding APBD Murni tahun 2021. Hal ini menyebabkan sumber dana

yang tersedia untuk membiayai kebutuhan belanja uang lain mengalami penurunan," jelas Tiwi.

Selain Raperda tentang APBD 2022, Bupati sekaligus menyerahkan empat Raperda lain. Yakni Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan masyarakat dan Laboratorium Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalinga.

Selanjutnya Raperda tentang Tarif Pelayanan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga.

lingga. Raperda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Raperda Tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Per-

panjang. "Empat Raperda tersebut telah mendapat Fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga empat Raperda itu dapat ditindaklanjuti," jelas Bupati. (Rus)



KR-Toto Rusmanto

Bupati Purbalingga menyerahkan RAPBD 2022 kepada Ketua DPRD setempat.

JIKA REHABILITASI PASAR SAYUR DITERUSKAN
Legislatif-Eksekutif Bisa 'Dikandangkan'

BANJARNEGARA (KR) - DPRD Banjarnegara dengan tegas menyatakan tidak menghentikan secara sepihak kegiatan rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara yang terbuka pada 11 Maret 2021. Kegiatan dihentikan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) Dinas PUPR karena dari hasil konsultasi DPRD bersama eksekutif ke berbagai pihak, telah terjadi kesalahan prosedur dalam proses rehabilitasi.

"Ada aturan-aturan yang dilanggar dalam prosesnya. Kalau diteruskan, seluruh anggota DPRD dan para

pejabat eksekutif bisa 'dikandangkan' karena melanggar hukum," kata Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara, Ryan Aditya Wahyu didampingi Ketua Komisi II Moh Rahmanudin, saat menerima kedatangan sejumlah perwakilan pedagang pasar sayur, Senin (8/11).

Perwakilan pedagang dipimpin oleh ketua paguyuban pedagang, Nurhayati. Mereka mempertanyakan masalah penghentian kegiatan rehabilitasi pasar sayur dan mengeluhkan berbagai masalah di pasar darurat di depan Stadion Olahraga Parakancangah.

Masalah yang timbul di antaranya omzet turun karena sepi pembeli, lokasi becek, keamanan kurang,

dan ada biaya tambahan untuk listrik serta lapak. Mereka minta DPRD membantu percepatan penyelesaian rehabilitasi pasar sayur.

Kepada perwakilan pedagang, Ryan Aditya Wahyu mengatakan bahwa setelah terjadi kebakaran, Pejabat Pembuat kebijakan (PPK) Dinas PUPR menerbitkan Surat Penanganan Darurat Nomor 01/APPR/SPR/DPUPR/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 kepada Direktur PT Sutikno Tirta Kencana dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 05/SPMK/PSR/DPUR/V/2021 tanggal 15 Mei 2021.

"Tentang anggaran biaya, bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (nonaktif) mengirim surat kepada

Ketua DPRD tanggal 13 Juli 2021 tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pasar sayur dan rencana pinjaman daerah Rp 20 miliar untuk membiayai kegiatan tersebut.

Bupati minta agar permohonan dapat disepakati oleh DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS Perubahan Tahun 2021," ungkap Ryan Aditya.

Jadwal pelaksanaan rehabilitasi pasar sayur selama 150 hari, 15 Mei 2021 hingga 11 Oktober 2021. PPK Dinas PUPR menghentikan kegiatan Rehabilitasi Pasar Sayur Banjarnegara per 13 September 2021, setelah menjadi sorotan DPRD karena diduga keras dalam prosesnya terjadi maladminitrasi. (Mad)



KR-Muchtar M

Perwakilan pedagang pasar sayur sedang mengadu di DPRD Banjarnegarea.

HUKUM

Pengangguran Edarkan Pil Sapi

YOGYA (KR) - Diduga melakukan tindak pidana tanpa kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Yarindo (Pil Sapi), laki-laki pengangguran berinisial M (24) diringkus petugas Satnarkoba Polresta Yogya dipimpin AKP Deni Irwansyah SE SI di wilayah Sedayu Bantul.

"Dari pengeledahan ditemukan barang bukti Pil Yarindo (Pil Sapi) dan setelah dilakukan interogasi mengaku telah mengedarkan pil tersebut kepada saksi DF dan AA," tutur Humas Polresta Yogya, AKP Timbul R, Rabu (10/11).

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi 8 butir Pil Yarindo, 1 HP dan uang tunai Rp 70.000.

"Sedang Barang Bukti yang disita dari saksi DF berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi 10 butir Pil Yarindo dan dari saksi AA berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi 10 butir pil Yarindo," jelasnya.

Tersangka M kemudian disangkakan melanggar Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 Tahun penjara dan denda Rp 1 M. (Vin)

PELAKU BERHASIL DITANGKAP
Modus Tanya Alamat, Jambret Beraksi

BANTUL (KR) - Sepak terjang Ny Sr warga Banguntapan Bantul yang kerap merampas kalung emas dengan modus tanya alamat berakhir di tangan polisi.

Perempuan 44 tahun tersebut disergap Tim Opsnal Reskrim Polsek Banguntapan Polres Bantul dipimpin kanit Reskrim Iptu Anar Fuadi SH MIP didampingi Katim Opsnal Aipda Bowo Setiawan SH MH di Jalan Jogyakarta Banguntapan, Bantul Selasa (9/11) sore.

Kini tersangka diperiksa di Polsek Banguntapan

dengan sejumlah barang bukti diantaranya, 1 unit Honda Beat Nopol AA 2691 OT, 1 helm merah dipakai tersangka saat menjalankan aksinya, 1 baju pelaku yang dipakai saat menjalankan aksinya. Kanit Reskrim Polsek Banguntapan, Iptu Anar Fuadi, Rabu (10/11), menuliskan hasil pemeriksaan sementara Ny Sr sudah 6 kali beraksi dengan modus sama, tanya alamat kemudian merampas kalung milik korban.

"Selain melakukan perampasan di Banguntapan, sebelumnya juga beraksi

di Pleret dan Piyungan," ungkapnya.

Dijelaskan, kasus tersebut bermula ketika Sapto Sulistyo S selaku orangtua korban melapor ke Polsek Banguntapan. Jumat pekan lalu sekitar pukul 13.15, anaknya Masheel Adreana bermain sepeda di sekitar rumahnya Dusun Sarirejo Singosaren, Banguntapan.

Pelapor melihat seorang wanita tidak dikenal mondar-mandir di sekitar rumah mengendarai motor Honda Beat. Setelah itu anaknya memberi tahu ada perempuan berpura pura tanya alamat. Tibatiba merampas dengan paksa kalung emas yang dipakai anaknya. Orangtua korban berusaha mencari pelaku dengan ciri-ciri tersebut diatas tidak ketemu.

Kemudian petugas Polsek Banguntapan diback-up penuh Unit Jatanras Krimum Polda DIY berhasil mendapatkan info tentang identitas tersagka dan menangkapnya di sekitar Terminal Giwangan Yogyakarta. (Roy)



KR-Sukro Riyadi

Ny Sr menjalani pemeriksaan di Polsek Banguntapan.

1 NELAYAN TEWAS

Perahu Terbalik Dihantam Gelombang

WATES (KR) - Perahu yang ditumpangi dua nelayan terbalik dihantam gelombang saat berangkat melaut di Pantai Glagah Temon, Rabu (10/11) pagi. Kejadian ini mengakibatkan seorang nelayan tewas dalam perawatan di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffry, mengatakan lakalaut ini terjadi sekitar pukul 06.00.

Kejadian bermula saat dua nelayan, yakni Santarjan (61) warga Mertasinga Cilacap Utara yang tinggal di Glagah Temon dan Sumardi Purwosentono (66) warga Sangkretan Glagah Temon, berangkat melaut dari Pelabuhan Adikarta Karangwuni Wates.

Santarjan yang bertugas sebagai tekong atau motoris dan Sumardi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) hendak mencari ikan di laut menggunakan perahu nelayan 'Senang Hati'. Saat perahu berada di muara Sungai Serang akan masuk ke laut tiba-tiba muncul ombak besar.

Akibatnya, perahu yang ditumpangi dua nelayan terbalik dihantam gelombang kemudian terhempas ke pemecah ombak hingga pecah serta mesin lepas dan hilang.

Mengetahui kejadian ini, teman korban yang sudah lebih dahulu masuk



KR-Istimewa

Petugas mengecek kondisi kapal yang pecah.

UANG DIGELAPKAN TEMAN MASA KECIL
Setahun Dilaporkan, Belum Ada Perkembangan

YOGYA (KR) - Sudah satu tahun mencari keadilan atas uangnya yang digelapkan oleh teman masa kecilnya, Hmd (50) mantan pembalap, Hermin mengeluhkan belum ada tindak lanjut dari Polda DIY atas laporan itu. Sedangkan barang bukti sudah lengkap dan diserahkan ke Kapolda DIY.

"Permintaan hitungan riil yang diminta terlapor sudah dipenuhi, namun belum ada kelanjutannya. Penyidik seakan pasif, sehingga kami patut menuga ada intervensi. Mau menunggu sampai kapan?. Saya bingung harus mengadu kemana lagi untuk memperjuangkan hak demi keadilan," ucap pelapor, Hermin kepada KR, Rabu (10/11).

Hermin menyebutkan perkembangan terakhir setelah menunggu hampir 3 minggu tidak ada tangga-

pan jawaban terlapor. "Permintaan terlapor hitungan riil melalui penyidik sudah saya balas melalui surat dari kronologis hingga hitungan riil juga lampiran bukti-bukti sudah disertakan," terang Hermin.

Tidak mendapatkan respons dari terlapor sampai saat ini, pihaknya juga sudah bersurat ke Kapolda cc ke Kapolri, Irwasum, Kompolnas dan Ketua Komisi 3 DPR RI.

"Saya sebagai korban sekaligus pelapor mohon keadilan demi kebenaran. Penyidik seolah pasif belum memberikan laporan SP2HP," ujar-nya. Sebelumnya juga sudah dilakukan upaya kekeluargaan untuk mengembalikan uang ratusan juta milik Hermin yang dipercayakan pada terlapor, bukti otentik sudah jelas terlapor menyerahkan buku tabungan yang didalamnya ada KTP di-

hadapan penyidik.

"Terlapor mau mediasi dan mengembalikan uang yang telah digunakannya, tapi cuma omongan saja. Saya hanya meminta hak saya yang sudah diambil terlapor," ucap Hermin. Kasus penggelapan uang ATM milik Hermin ini bermula awal 2014 ia menitipkan uang pada Hmd untuk ditransferkan pada saudaranya. Saat itu Hermin pulang dari Palembang ke kampung halamannya di Pandean Godean.

Ternyata uang tabungan milik Hermin yang rencana untuk masa depan anaknya itu secara bertahap dikuras oleh Hmd untuk kepentingan pribadi. "Mediasi antar keluarga juga gagal dan karena tidak ada itikad baik dari terlapor, maka saya bawa kasus ini ke jalur hukum," ungkap Hermin. (Vin)